

SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR .22. TAHUN .2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

(2) 1254 (P)
3884/70 (H)
Dn Koperasi

r 4 2 6 8 8 1 5 2 4 14 8

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha kecil dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 133 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

Pasal I

Ketentuan angka 1.1. Bab I dan T.C-27 Bab VI dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 37 Seri E Nomor 63) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 22 SERI E NOMOR 12**

Handwritten notes at the bottom of the page, including the number '12' and other illegible markings.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

Penyusunan Renstra PD harus berpedoman pada RPJMD serta menelaah dokumen rencana strategis dari kementerian/ lembaga terkait dan rencana strategis PD Provinsi yang menangani urusan pemerintahan yang sama. Renstra PD yang memiliki masa perencanaan lima tahun berfungsi sebagai acuan bagi PD untuk menyusun rencana kerja tahunan pada perangkat daerah tersebut (Renja PD). Adapun tahapan penyusunan Renstra PD adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- 5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Kualitas dokumen Renstra PD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo disusun berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo serta mengacu pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Renstra Kementerian Perdagangan. Selain itu juga mengacu Renstra Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat daerah merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis PD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

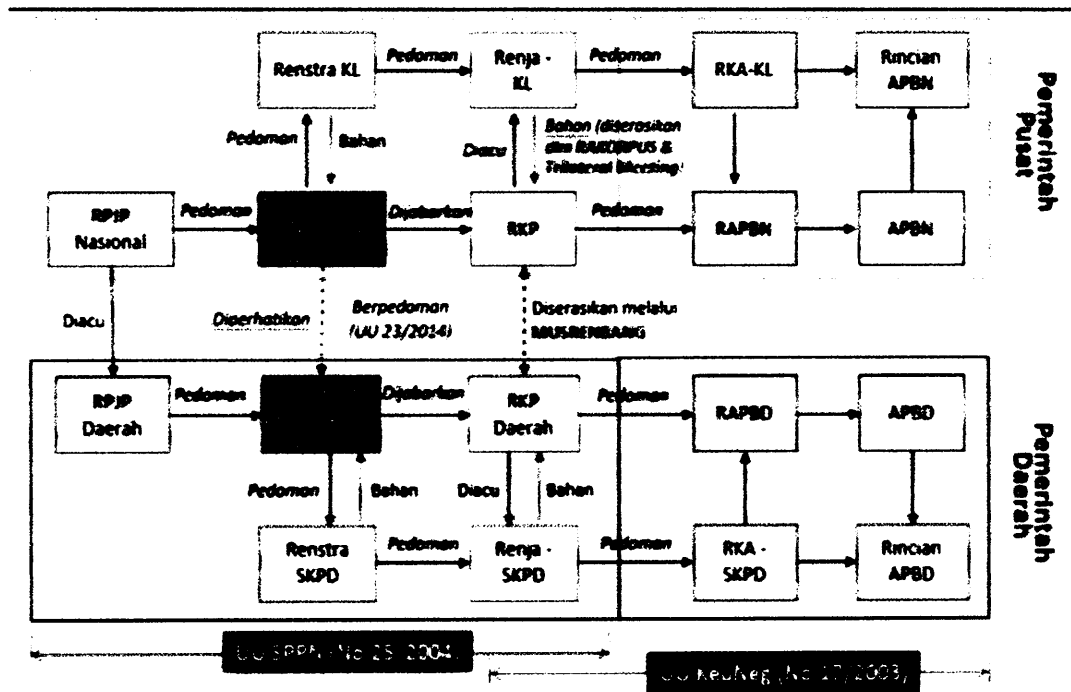
Dokumen perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra PD) ini terutama mengacu pada arah kebijakan dan program-program strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, disamping tetap harus adaptif dan dinamis dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang terjadi dalam lingkup spasial maupun sektoral.

Perubahan ini terjadi karena pengelolaan asset DINKUKMP belum terorganisir secara maksimal baik dari segi penatausahaan maupun pengawasan BMD. Berdasarkan Pemeriksaan dari BPK terdapat catatan untuk data pendapatan di pasar daerah. Hal itu terjadi karena kurangnya sarana prasarana, berupa laptop bagi kepala pasar. Sehingga Dinas mengusulkan untuk melakukan pembelian laptop. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil Desk dengan Bappedalitbang pada tanggal 10 Maret 2023, catatan dari Bappedalitbang bahwa pembelian laptop dimasukan dalam Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya. Pengadaan asset tak berwujud diperuntukkan untuk mempermudah penyimpanan data-data dalam suatu database. Dinas KUKMP juga memiliki keterbatasan Barang Milik Daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Gedung kantor sudah tidak layak dan juga belum tersedianya Gedung Unit Metrologi Legal yang sesuai standar. Pada Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri juga ditambahkan karena P3DN juga merupakan Program Nasional dengan tujuan memasarkan produk-produk asli UMKM Purworejo, produk-produk tersebut dapat dipasarkan melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, jasa akomodasi.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan antara pusat dan daerah tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 1.

Hubungan antar dokumen perencanaan antara pusat dan daerah



Handwritten notes at the bottom of the page, including numbers 1 through 20 and some illegible characters.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo merupakan OPD yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH) dan Urusan Pilihan (URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN). Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2022 s/d 2026, maka disusunlah beberapa program untuk mendukungnya, terdiri dari 13 (tiga belas) program di bidang Koperasi Usaha Mikro 7 (tujuh) program di bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan 3 (tiga) program Sekretariat 1 (satu) serta di Bidang Perijinan Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian 2 (dua) program. Dari ke 13 Program tersebut disusunlah Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai Dinas yang menjalankan fungsi perekonomian daerah, dalam rangka mencapai visi misi Kabupaten Purworejo akan dicapai melalui program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Kegiatan :

Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Kegiatan :

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan :

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota**

3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Kegiatan :

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
- Penghargaan kesehatan Ksp/USP koperasi kewenangan Kabupaten/Kota**

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Kegiatan :

- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan :

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kegiatan :

- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan.

Sub Kegiatan :

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan :

- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala

Sub Kegiatan

- Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi

8. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Kegiatan :

- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan

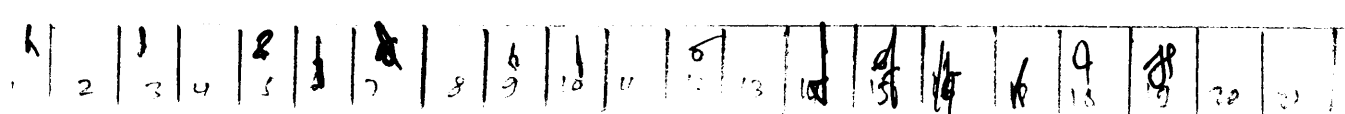
- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan :

- Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan



9. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Kegiatan :

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

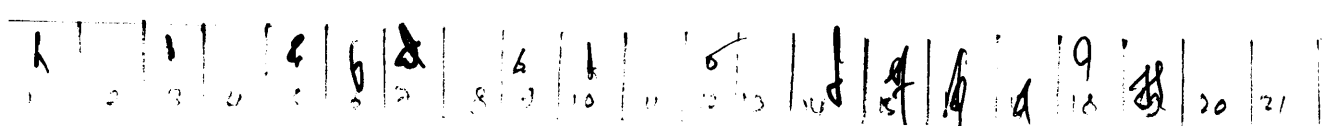
2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah

Sub Kegiatan :

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Kabupaten/Kota.



10. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Kegiatan :

Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten / Kota
- Pameran Dagang Nasional
- Pameran Dagang Lokal

11. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kegiatan :

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

12. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Kegiatan :

- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kabupaten/Kota
- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

**13. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan :

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

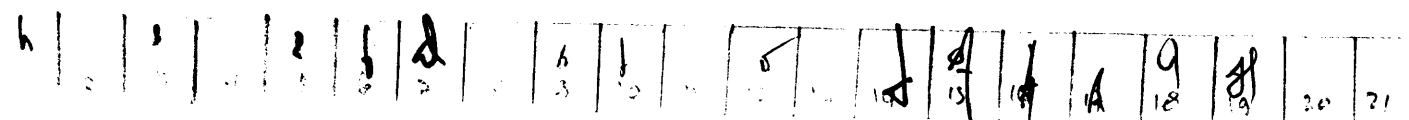
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi barang Milik Daerah

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD
- 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



5. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi

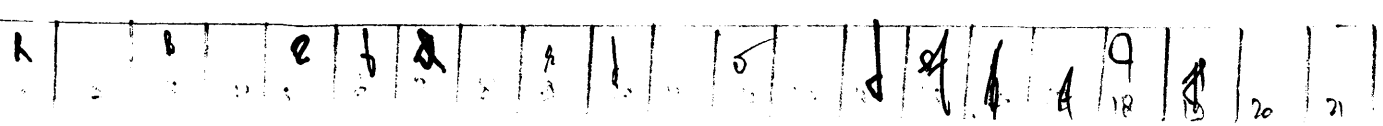
- 1) Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Alat Angkutan darat tak Bermotor
- 4) Pengadaan Mebel
- 5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9) Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



6.2 Alasan Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah meliputi Sub kegiatan :

- a. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD
- b. Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD

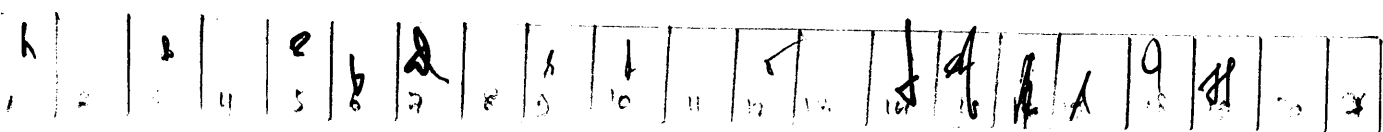
Alasan : perubahan Pengelolaan asset DINKUKMP belum terorganisir secara maksimal baik dari segi penatausahaan maupun pengawasan BMD

2. Kegiatan pendanaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi Sub kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas jabatan.
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Pengadaan Alat Angkutan darat tak bermotor.
- d. Pengadaan mebel
- e. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya.
- f. Pengadaan Aset Tak Berwujud
- g. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
- h. Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Alasan :

- a. Berdasarkan Pemeriksaan dari BPK terdapat catatan untuk data pendapatan di pasar daerah. Hal itu terjadi karena kurangnya sarana prasarana berupa laptop bagi kepala pasar. Sehingga dinas mengusulkan untuk melakukan pembelian laptop. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil desk dengan Bappedalitbang pada tanggal 10 Maret 2023. Catatan dari Bappedalitbang bahwa pembelian laptop dimasukan dalam Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya.
- b. Terbatasnya BMD yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah.



- c. Gedung kantor DKUKMP sudah tidak layak dan belum tersedianya gedung unit metrologi legal yang sesuai dengan standar .
 - d. Pengadaan asset tak berwujud diperuntukan untuk mempermudah penyimpanan data-data dalam suatu data base.
 - e. Aset tak berwujud digunakan untuk mempermudah penyimpanan data suatu database aplikasi.
3. Kegiatan Pelaksanaan Promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri meliputi Sub Kegiatan :
- a. Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

Alasan :

Merupakan Program Nasional P3DN untuk memasarkan produk produk asli Purworejo agar produk-produk UMKM tersebut dapat dipasarkan melalui kemitraan dengan retail, marketplace,perhotelan dan jasa akomodasi.

Kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan, agar tujuan dan sasaran yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan , Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran,dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada TabelT-C. 27 Perubahan ke dua Renstra 2021-2026.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TC-27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
UR	B/P U	PRG	KEG	SUB K					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Pagu		
									Realisasi	Realisasi*)	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
						Persentase Koperasi Modern	%	1,01%	2,02%	3,03%		7,07%		11,11 %		15,15%		19,19%			DINKUKMP	Kabupaten Purworejo		
						Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	33,69%	34,79%	36,26 %		37,73 %		39,19 %		40,66%		42,12%			DINKUKMP	Kabupaten Purworejo		
2	1	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Isin Koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu	%	100%	100%	100%	10.820.000	100%	8.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000			DINKUKMP	Kabupaten Purworejo	
																	10	25.820.000	DINKUKMP	Kabupaten Purworejo				

Handwritten numbers and symbols at the bottom of the page, including a large '5' and a sequence of numbers from 2 to 21.

2	1	2	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dana Simpan Pinjam dan Pemenuhan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Kabupaten/Kota	Izin Usaha			2	6.820.000	2	4.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	10	25.820.000	DINKUKMP	Kabupaten Purworejo
																		5	20.000.000	DINKUKMP	Kabupaten Purworejo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2	1	3	2	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan yang Terdiri Dengan Pengawasan Kekuatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha			273	10.000.000	273	7.000.000	273	8.000.000	273	8.000.000	273	8.000.000	273	41.000.000	DINKUKMP	Kabupaten Purworejo
2	1	3	2	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kepatuhan yang mencakup Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kota	Unit Usaha			273	10.000.000	273	7.000.000	273	8.000.000	273	8.000.000	273	8.000.000	273	41.000.000	DINKUKMP	Kabupaten Purworejo
2	1	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	34,67%	69,33%	86,05 %	84.057.400	86,36 %	61.000.000	86,67 %	67.000.000	86,96%	68.000.000	87,23%	68.000.000	87,23 %	348.057.400	DINKUKMP	Kabupaten Purworejo
																				94	348.057.400	DINKUKMP	Kabupaten Purworejo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2	1	7	4	2	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dibakukan Penilaian Keseluruhan	Unit Usaha	86	70.000.000	88	50.000.000	90	50.000.000	92	50.000.000	94	50.000.000	94	270.000.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
2	1	7	4	2	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	86	14.057.400	10	11.000.000	10	17.000.000	10	18.000.000	94	18.000.000	94	78.057.400	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
2	1	7	5	5	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompoten	%	6,59%	390.304.000	10,00 %	281.000.000	15,00 %	309.000.000	20,00%	317.000.000	25,00%	316.000.000	25,00 %	1.613.304.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
									25											1.613.304.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo

112062 11/2021 20 21

2	17	15	20	1	Peningkatan dan Pemahaman Perketahanan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memenuhi Penggabungan Partisipatif	Orang	190	390.304.000	180	281.000.000	180	309.000.000	180	317.000.000	180	316.000.000	910	1.613.304.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworej o
2	17	15	20	1	PROGRAM FEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Dibina	%	14,65 %	123.662.000	18,32 %	89.000.000	21,98 %	250.000.000	25,64 %	280.000.000	29,30 %	320.000.000	1	1.062.662.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworej o
																		250	1.062.662.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworej o

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature and the number 21.

2	1	6	2	1	Pembe rdayaa n Pening katan Produ ktivita s, Nilai Tamba h, Akses Pasar, Akses Pembi ayaan, Pengu atan Kelem bagaa n, Penata an Manaj emen, Standa risasi, dan Restru kturis asi Usaha Kopera si Kewen angan Kabup aten/K ota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausaha an	Oran g			40	123.662. 000	45	89.000 .000	45	250.00 0.000	50	280.000. 000	55	320. 000. 000	235	1.06 2.66 2.00 0	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo
						Persentase Usaha Mikro Berizin yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	%	0,59	1,49	1,72%		2,13%		2,38%		3,11%		3,69%		3,69%		DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2	1	7	2	1	Pendat aan Potens i dan Penge mbang an Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Berhasil Tambah, Memiliki Akses Pasa r, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturis asi Usaha Koperasi Kewenangan Kebupaten/	Unit Usaha			10000	43.864.1 00	10000	23.000 .000	20.000	66.8 64.1 00	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

						Kota																
2	1	7	2	2	Pembe rdayaa n melalu i Kemitr aan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usa ha			200	64.975.2 00	200	30.000 .000	200	30.000.0 00	200	30.0 00.0 00	1.000	184. 975. 200	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo	
2	1	7	2	3	Fasilit asi Kemud ahan Perizin an Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatka n Perizinan	Unit Usa ha			150	129.714. 000	150	80.000 .000	150	80.000.0 00	150	80.0 00.0 00	750	449. 714. 000	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo	
2	1	7	2	4	Pembe rdayaa n Kelem bagaa n Potens i dan Penge mbang an Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendamping an Terhadap Usaha Mikro	Unit Usa ha			780	1.102.73 9.000	780	840.00 0.000	780	960.00 0.000	780	990.000. 000	987. 000. 000	3.900	4.87 9.73 9.00 0	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo
2	1	7	2	5	Koordi nasi dan Sinkro nisasi denga n Para Peman gku Kepent ingan dalam Pembe rdayaa n Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdaya an Usaha Mikro	Oran g			270	35.216.4 00	270	20.000 .000	270	20.000 .000	270	20.000.0 00	20.0 00.0 00	1.350	115. 216. 400	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2	1	8			PROG RAM PENG EMBA NGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Berisin yang Meningkat Menjadi Wira Usaha	%	1,87%	3,60%	5,08%	9.226.1 95.600	6,55%	6.651. 000.0 00	8,03%	7.306. 000.0 00	9,50%	7.503.0 00.000	10,97%	7.48 5.00 0.00 0	0	38.1 71.1 95.6 00	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo
																				450	38.1 71.1 95.6 00	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo
2	1	8	2	1	Fasilit asi Usaha Mikro Menja di Usaha Kecil dalam Penge mbang an Produ ksi dan Pengol ahan, Pemas aran, SDM,	Usaha Mikro yang Tersubvinsi dalam Pengembang an Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Usaha Usaha		100	9.226.19 5.600	2000	6.651. 000.00 0	2500	7.306. 000.00 0	3000	7.503.00 0.000	3500	7.48 5.00 0.00 0	11.100	38.1 71.1 95.6 00	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo	

Handwritten notes at the bottom of the page, including symbols like a triangle and a square, and some illegible characters.

2	1	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
2	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
2	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
2	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		16	1.000.000	16	1.000.000	16	1.000.000	16	1.000.000	16	1.000.000	80	5.000.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including various marks, initials, and dates (e.g., 20 21).

2	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	30	15.000.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
																			100%	40.735.613	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
																			100%			
2	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Uang yang Maksimal Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		115	7.341.046.396	115	7.642.745.052	115	8.404.680.770	115	8.634.002.335	115	8.665.938.560	115	40.688.413	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
2	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	30	5.000.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the date '20 21'.

2	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan			26	7.238.400	26	7.500.000	26	7.500.000	26	7.500.000	26	7.500.000	130	37.238.400	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
2	1	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
																				6	13.500.000 *)	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
																						DINKU KMP	Kabupaten Purworejo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2	1	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan						2	1.000.000 *)	2	1.000.000 *)	2	1.000.000 *)	6	3.000.000 *)	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo	
2	1	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan						2	3.500.000 *)	2	3.500.000 *)	2	3.500.000 *)	6	10.500.000 *)	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo	
																			100%	291.870.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo	
2	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			2	58.374.000	2	58.374.000	2	58.374.000	2	58.374.000	2	58.374.000	10	291.870.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo

Handwritten notes at the bottom of the page, including the number '2' and various illegible scribbles.

2	1	1	2	4	Penga daan Alat Angku tan Darat Tak Bermo tor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	unit											10	40.000.0 00 *)	10	40.0 00.0 00 *)	20	80.0 00.0 00 *)	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo	
2	1	1	2	5	Penga daan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket												6	1.020.00 0.000 *)	3	398. 000. 000 *)	9	1.41 8.00 0.00 0 *)	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo
2	1	1	2	6	Penga daan Peralat an dan Mesin Lainny a	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit						11	120.00 0.000 *)	67	731.000. 000 *)	25	235. 000. 000 *)	104	966. 000. 000 *)			DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo		
2	1	1	2	8	Penga daan Aset Tak Berwuj ud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang disediakan	unit											2	200.000. 000*)			2	200. 000. 000 *)	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo	
2	1	1	2	9	Penga daan Gedun g Kantor atau Bangu nan Lainny a	Jumlah Unit Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit											1	5.000.00 0.000 *)	1	5.00 0.00 0.00 0 *)	2	10.0 00.0 00.0 00 *)	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo	
2	1	1	2	10	Penga daan Saran a dan Prasar ana Gedun g Kantor atau Bangu nan Lainny	Jumlah Unit Bangunan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit											1	250.000. 000 *)			1	250. 000. 000 *)	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo	

Handwritten notes at the bottom of the page, possibly a list of numbers or identifiers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

					Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya																
2	17	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		21	13.587.000	21	15.000.000	21	15.000.000	21	15.000.000	21	15.000.000	21	73.587.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
2	17	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	41.900.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	221.900.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the number '2' and various illegible markings.

3	3	4	PROG RAM STABI LIBASI HARG A BARA NG KEBU TUHA N POKO K DAN BARA NG PENTI NG	Perentase koefisien variasi harga antar waktu	%	8,80%	5,80%	20%	288.827 .000	20%	208.0 00.00 0	20%	229.0 00.00 0	20%	238.000 .000	20%	234. 000. 000	20%	1.19 4.82 7.00 0	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo
				Perentase kinerja realisasi pupuk	%	94,08%	36,54%	74%		82%		86%		90%				90,00 %	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo	
																		20	540. 827. 000	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo

Handwritten notes and signatures in the right margin, including a signature that appears to be 'A. B. D.' and other illegible markings.

3	3	4	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan		4	58.827.000	4	58.000.000	4	108.000.000	4	108.000.000	4	108.000.000	20	440.827.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo
3	3	4	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan		4	50.000.000	4	50.000.000						20	250.000.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo	

Handwritten notes and numbers at the bottom of the page, including a large '1' and various smaller numbers and symbols.

	5	434.000.000	DINKU KMP	Kabupaten Purwokerto
--	---	-------------	-----------	----------------------

Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																			

Handwritten notes and signatures in the right margin, including a signature and the date 20 21.

3	30	4	202	1	Peman tauan Harga dan Stok Baran g Kebut uhan Pokok dan Baran g Pentin g pada Pelaku Usaha Distrib usi Baran g dalam 1 (satu) Kabup aten/K ota	Jumlah Laporan Peman tauan Harga dan Stok Baran g Kebutuhan Pokok dan Baran g Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Baran g dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	lapo ran		4	100.000. 000	4	45.000 .000	4	61.000 .000	4	67.000.0 00	4	66.0 00.0 00	20	339. 000. 000	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo
3	30	4	202	2	Peman tauan Harga dan Stok Baran g Kebut uhan Pokok dan Baran g Pentin g pada Pasar Rakyat yang Terinte grasi dalam Sistem Inform asi	Jumlah Laporan Peman tauan Harga dan Stok Baran g Kebutuhan Pokok dan Baran g Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	lapo ran		4	20.000.0 00	4	15.000 .000	4	20.000 .000	4	20.000.0 00	4	20.0 00.0 00	20	95.0 00.0 00	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo

Handwritten notes at the bottom of the page, including numbers 1 through 10 and various symbols and characters.

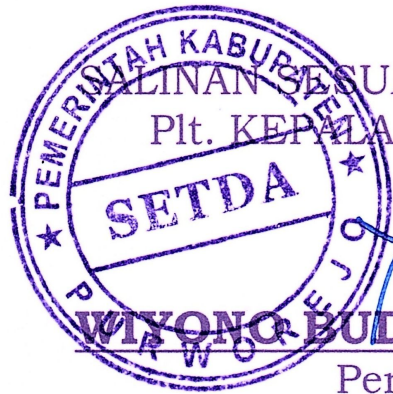
3	3	5	2	1	Pembi naan dan Penge mbang an Usaha Produ k Ekspor Unggu lan Kabup aten/K ota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Didina	pele ku usah a		20	142.419. 000	25	100.00 0.000	30	138.00 0.000	30	152.000. 000	30	151. 000. 000	40	683. 419. 000	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo	
3	3	5	2	2	Pamer an Dagan g Nasion al	Jumlah Pelaku Usaha yang Didaftarkan dalam Pameran Dagangan	pele ku usah a		30	278.100. 000	35	200.00 0.000	40	200.00 0.000	45	200.000. 000	50	200. 000. 000	50	1.07 8.10 0.00 0	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo	
3	3	5	2	3	Pamer an Dagan g Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Didaftarkan dalam Pameran Dagangan Lokal	pele ku usah a		80	258.125. 000	90	189.00 0.000	100	200.00 0.000	110	200.000. 000	120	200. 000. 000	120	1.04 7.12 5.00 0	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo	
3	3	6			PROG RAM STAN DARDI SASI DAN PERLI NDUN GAN KONS UMEN	Persentase Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkap annya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	38,28%	57,39%	61%	777.180 .000	64%	560.0 00.00 0	68%	615.0 00.00 0	72%	632.000 .000	76%	630. 000. 000	76%	3.21 4.18 0.00 0	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo

Handwritten notes at the bottom of the page, including numbers and symbols.

																	10	3.21 4.18 0.00 0	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo			
3	30	6	2,01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Pengalihan Ditemukan Ulang	unit			5273	717.180.000	5887	530.000.000	5887	585.000.000	5887	602.000.000	5887	600.000.000	5887	3.03 4.18 0.00 0	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo
3	30	6	2,01	2	Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang			100	60.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	260	180.000.000	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	%	0	0	14,29%	149.151.200	28,57%	107.000.000	42,86%	118.000.000	57,14%	121.000.000	71,43%	121.000.000	2	616.151.200	DINKU KMP	Kab upat en Pur wore jo

h 8 p 6 d 1 1 5 d 1 1 1 1 9 1 1

3	3	7	2	2	Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Mitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM						45	118.000.000	50	121.000.000	55	121.000.000	55	360.000.000		
3	3	7	2	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	dukumen			20	71.000.000		50.000.000						21	121.000.000	DINKU KMP	Kabupaten Purworejo



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

WIYONO BUDI SANTOSO, S.H.

Penata Tk.I

NIP 19690516 199703 1 003

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Handwritten notes at the bottom of the page, including the date '14/11/2018' and other illegible markings.